



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 450 TAHUN 2018

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 5
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG
DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan penulisan SPPT-PBB serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN WALI KOTA.

Pasal I

Ketentuan lampiran dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 398) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 31 Desember 2018

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 31 Desember 2018

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI




MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 450

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
 NOMOR : 02 Tahun 2018
 TANGGAL : 31 Desember 2018
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN WALI KOTA

1. SURAT PENGUKUHAN WAJIB PAJAK

| | |
|--|--|
|  | <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Kota Cimahi Gd. C. Lantai 2 Telp. (022)-6652559 Fax (022) 6632308 Website : cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat</p> |
| <p>SURAT PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK</p> | |
| <p>Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota dengan ini diterangkan bahwa :</p> | |
| 1. Nama | : |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) | : |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha | : |
| 4. Alamat | : |
| 5. Status Modal | : |
| 6. Status Usaha | : |
| 7. Kewajiban Pajak | : |
| | <input type="checkbox"/> Pajak Reklame <input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah <input type="checkbox"/> Pajak Bumi dan Bangunan |
| 8. Kode Seri Faktur Pajak | : |
| <p>Telah dikukuhkan pada tata usaha Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi sebagai Wajib Pajak. Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal</p> | |
| <p>Cimahi, KEPALA BAPPENDA</p> | |
| <p>..... NIP.</p> | |

2. SURAT PENUNJUKAN SEBAGAI PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB USAHA WAJIB PAJAK

SURAT PENUNJUKAN SEBAGAI PEMILIK PENANGGUNG JAWAB USAHA WAJIB PAJAK

KOP PERUSAHAAN -

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Sebagai Pemilik Penanggung Jawab Usaha Wajib Pajak

Yth.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cimahi Gd. C Lantai 2
Kota Cimahi Telp. 022-6652559 Fax (022) 6632308

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Direksi atau Yang Dikuasakan

Menugaskan ;

1. Nama :
2. Jabatan :
3. No. Telepon/HP :
4. Email :

sebagai Pemilik Penanggung jawab pada perusahaan kami.

Demikian kami sampaikan.

....., 20...

Meterai Rp. 6.000


Tandatangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

Tembusan:

3. KARTU NOMOR PESERTA WAJIB PAJAK DAERAH

a. Kartu NPWPD Tampak Depan

| | |
|---|--|
|  | PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Kota Cimahi Gd. C. Lantai 2 Telp. (022)-6652559 Fax (022) 6632308 Website : cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat |
| NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH | |
| NO. REG : - Bappenda | |
| NAMA PERUSAHAAN | : |
| ALAMAT | : |
| NPWPD | : |
| WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK | : |

b. Kartu NPWPD Tampak Belakang

| |
|---|
| PERHATIAN |
| 1. Kartu ini diberikan atas jenis usaha / Obyek Pajak : |
| 2. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak Terpadu Kota Cimahi |
| 3. NPWPD agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan daerah |
| 4. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan ke Bappenda Kota Cimahi |
| www.cimahikota.go.id /email: dinaspendatankotacimahi@gmail.com |
| <small>DENGAN MEMBAYAR PAJAK SECARA TEFAT DAN BENAR ANDA TURUT MEMBANGUN KOTA CIMAHI</small> |

WALI KOTA CIMAHI,
ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI


MARIA FITRIANA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
 NOMOR : 62 Tahun 2018
 TANGGAL : 31 Desember 2018
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN WALI KOTA

1. SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN NPWPD

| <u>SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN NPWPD</u> | | | |
|--|-------------------------|-------|-----------------------------------|
| Yang bertanda tangan di bawah ini : | | | |
| 1. Nama | | : | |
| 2. Klasifikasi Lapangan Usaha | | : | |
| 3. Alamat | | : | |
| 4. Status Modal | | : | |
| 5. Status Usaha | | : | |
| 6. Kepemilikan NPWPD*) | | : | |
| No | Jenis Pajak Daerah | NPWPD | Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak |
| 1 | Pajak Reklame | | |
| 2 | Pajak Air Tanah | | |
| 3 | Pajak Bumi dan Bangunan | | |
| <p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">....., 20.....</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Meterai Rp. 6.000</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Tanda tangan dan Cap Perusahaan</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Nama Jelas</p> | | | |
| <p><u>Keterangan :</u></p> <p>*) Dilampirkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sesuai dengan isian format diatas</p> | | | |

2. FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Kota Cimahi Gd. C. Lantai 2
 Telp. (022)-6652559 Fax (022) 6632308
 Website : cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUP BESAR/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat Petunjuk)

Jenis Penghapusan : Permohonan Wajib Pajak Secara Jabatan

Nomor LHV / LHP :

1. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah :

2. Nama Wajib Pajak Daerah :

Gelar Depan : Gelar Belakang

2. ALASAN PENGHAPUSAN NPWPD

- Wajib Pajak tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Kena Pajak Daerah karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran.
- Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk menentukan Nomor Wajib Pajak Daerah yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- Wajib Pajak yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Daerah yang telah menghentikan kegiatan usahanya.
- Alasan lain :

3. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Telah diteliti :

Petugas,

Lengkap dan Benar

....., tanggal

Pemohon,

.....
 NIP.....

.....

**PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

Jenis Penghapusan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau kotak Penghapusan Secara Jabatan jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Petugas.

Nomor LHV / LHP : diisi dengan nomor LHV / LHP yang mendasari penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. **Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah** : diisi dengan nomor NPWPD Wajib Pajak yang mengajukan penghapusan NPWPD atau dihapuskan secara jabatan

2. **Nama Wajib Pajak** : diisi dengan nama Wajib Pajak Daerah yang mengajukan penghapusan NPWPD atau dihapuskan secara jabatan sesuai yang tertulis dalam Kartu NPWPD atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Gelar ditulis dalam hal Wajib Pajak orang Pribadi memiliki gelar

B. ALASAN PENGHAPUSAN NPWPD

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan alasan penghapusan NPWPD. Jika memilih alasan lain, uraian alasan mohon dituliskan secara jelas.

C. PERNYATAAN

Cukup Jelas

Catatan : Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Dalam hal penghapusan secara jabatan, ditandatangani oleh pengusul

4. SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR :

TENTANG

PENOLAKAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH
WALI KOTA CIMAHI,

Membaca : Surat Permohonan Saudara Nomor Tanggal yang bertindak untuk dan atas nama sebagai Wajib Pajak yang beralamat

NPWPD :

Mengingat : 1. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota;
2. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Menolak Surat Permohonan Saudara Nomor Tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak Saudara yang beralamat

NPWPD :

KEDUA : Untuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
KETIGA : Memenuhi pembayaran pajak sesuai Surat Ketetapan yang telah diterima;
Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 450

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
 NOMOR : 62 Tahun 2018
 TANGGAL : 31 Desember 2018
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 WALI KOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN 2015
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
 DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN
 PENETAPAN WALI KOTA

DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN

| UPAH PEKERJA | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------|
| NO | NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA | SATUAN | HARGA SEBELUM PELIMPAHAN TAHUN 2013 | HARGA TAHUN 2015 |
| 0101 | MANDOR | HR | 40,500.00 | 83,000.00 |
| 0102 | KEPALA TUKANG | HR | 36,450.00 | 79,000.00 |
| 0103 | TUKANG | HR | 33,750.00 | 72,000.00 |
| 0104 | PEKERJA | HR | 25,650.00 | 61,000.00 |
| BAHAN BATU/PASIR | | | | |
| KODE | NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA | SATUAN | HARGA SEBELUM PELIMPAHAN TAHUN 2013 | HARGA TAHUN 2015 |
| 0201 | PASIR URUG | M3 | 65,000.00 | 68,500.00 |
| 0202 | PASIR PASANG | M3 | 72,000.00 | 195,000.00 |
| 0203 | PASIR BETON | M3 | 60,000.00 | 255,000.00 |
| 0204 | BATU KALI | M3 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 0205 | BATU KORAL (UNTUK BETON) | M3 | 75,000.00 | 190,000.00 |
| 0206 | SPLIT 1/2 - 2.3 (UNTUK BETON) | M3 | 70,000.00 | 119,820.00 |
| 0207 | BATU BATA | BH | 1,000.00 | 1,150.00 |
| 0208 | CONBLOCK 10X10X20 | BH | 2,000.00 | 2,000.00 |
| SEMEN | | | | |
| KODE | NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA | SATUAN | HARGA SEBELUM PELIMPAHAN TAHUN 2013 | HARGA TAHUN 2015 |
| 0301 | SEMEN PC ABU-ABU | ZAK | 31,050.00 | 69,000.00 |
| 0302 | SEMEN PUTIH | ZAK | 50,000.00 | 91,500.00 |
| KAYU | | | | |
| KODE | NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA | SATUAN | HARGA SEBELUM PELIMPAHAN TAHUN 2013 | HARGA TAHUN 2015 |
| 0401 | KAYU KAMPER | M3 | 3,320,100.00 | 3,320,100.00 |
| 0402 | KAYU MERANTI | M3 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 0403 | PAPAN TERENTANG (UNTUK BEKISTING) | M3 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 0404 | DOLKEN Ø 8-10 CM | BTG | 5,000.00 | 31,000.00 |
| 0405 | DAUN PINTU BESI (ROL - DOOR) | M2 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 0406 | KUSEN PINTU / JENDELA ALUMUNIUM | M1 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 0407 | PINTU/JENDELA KACA ALUMUNIUM | M2 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 0408 | JENDELA/BOVENLICHT | M2 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 0409 | PAPAN KAYU KAMPER | M3 | 3,254,830.00 | 3,254,830.00 |
| BAHAN BESI/BAJA | | | | |
| KODE | NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA | SATUAN | HARGA SEBELUM PELIMPAHAN TAHUN 2013 | HARGA TAHUN 2015 |
| 0501 | BESI BETON | KG | 1,500.00 | 9,500.00 |
| 0502 | KAWAT BETON | KG | 2,250.00 | 17,600.00 |
| 0503 | BAJA PROFIL WF | KG | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 0504 | BESI PROFIL C | KG | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 0505 | BESI PLAT | KG | 1,400.00 | 1,400.00 |

| 0506 | PAKU | | KG | 2,000.00 | 20,250.00 |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|--------|-------------------------------------|------------------|
| 0507 | BOU'T | | KG | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 0508 | PAKU ASBES | | BH | 100.00 | 100.00 |
| BAHAN ATAP | | | | | |
| KODE | NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA | | SATUAN | HARGA SEBELUM PELIMPAHAN TAHUN 2013 | HARGA TAHUN 2015 |
| 0601 | GTG BIASA/PLETONG | | BH | 500.00 | 1,820.00 |
| 0602 | KODOK | | BH | 400.00 | 2,550.00 |
| 0603 | KERAMIK GLAZUR | | BH | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 0604 | GTG BETON | | BH | 2,000.00 | 5,100.00 |
| 0605 | DECRABON (2 LBR) | | M2 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 0606 | SIRAP ULIN (100 BH) | | M3 | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 0607 | ASBES GELOMBANG | | M4 | 9,000.00 | 35,000.00 |
| 0608 | SENG GLB BJLS 33 | | LBR | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 0609 | ALUMUNUM GLB | | M2 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 0610 | SOANDEX (STEEL SHEET) | | LBR | 20,000.00 | 20,000.00 |
| BAHAN LANTAI | | | | | |
| KODE | NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA | | SATUAN | HARGA SEBELUM PELIMPAHAN TAHUN 2013 | HARGA TAHUN 2015 |
| 0701 | UBIN PC ABU ABU | | M2 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 0702 | TERASO 30X30 | | M2 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 0703 | KERAMIK 30X30 LOKAL | | M2 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 0704 | MARMER 30X30 LOKAL | | M2 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 0705 | VINYL 30X30 | | M2 | 6,000.00 | 25,370.00 |
| 0706 | PAVING BLOCK (UNTUK PERKERASAN JALAN) | | M2 | 27,000.00 | 53,500.00 |
| 0707 | PARQUET (PARKET) | | M2 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| BAHAN LANGIT - LANGIT | | | | | |
| KODE | NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA | | SATUAN | HARGA SEBELUM PELIMPAHAN TAHUN 2013 | HARGA TAHUN 2015 |
| 0801 | PLYWOOD 4'X8'X4' MM | | LBR | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 0802 | PLYWOOD 4'X8'X6' MM | | LBR | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 0803 | PLYWOOD 4'X8'X3' MM | | LBR | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 0804 | ASBES / ETERNIT | | M2 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 0805 | AKUSTIK 30X60 | | M2 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 0806 | GYPSON | | M2 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 0807 | BAMBU ANYAM | | M2 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 0808 | LIS KAYU 1/3 | | M2 | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 0809 | LISPLANK | | M2 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| BAHAN PINTU/KACA/KUSEN | | | | | |
| KODE | NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA | | SATUAN | HARGA SEBELUM PELIMPAHAN TAHUN 2013 | HARGA TAHUN 2015 |
| 0901 | KUSEN ALUMUNUM | | M' | 40,000.00 | 72,070.00 |
| 0902 | NAKO + KACA | | DAUN | 5,000.00 | 75,000.00 |
| 0903 | KACA POLOS 5MM | | M2 | 28,890.00 | 95,000.00 |
| 0904 | KACA RAYBAN 5MM | | M2 | 25,000.00 | 12,000.00 |
| 0905 | KACA LAMINATED RAYBAN | | M2 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 0906 | RANGKA ALUMUNUM | | M-LS | 15,000.00 | 15,000.00 |
| ALAT SANITAIR/PLUMBING | | | | | |
| KODE | NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA | | SATUAN | HARGA SEBELUM PELIMPAHAN TAHUN 2013 | HARGA TAHUN 2015 |
| 1001 | ASBES DATRA | | M2 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 1002 | KLOSET DUDUK / MONOBLOK | | BH | 725,630.00 | 1,200,000.00 |
| 1003 | BATHTUB | | BH | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 1004 | WASTAFEL | | BH | 200,000.00 | 395,000.00 |

| 1005 | BAK MANDI | BH | 168,750.00 | 182,700.00 |
|--------------------|-------------------------------|--------|---|---------------------|
| 1006 | SHOWER | BH | 70,000.00 | 115,000.00 |
| 1007 | BIDET | BH | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 1008 | URINOIR | BH | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 1009 | MEJA DAPUR | BH | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 1010 | METAL ZINK 1 LUBANG | BH | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 1011 | METAL ZINK 2 LUBANG | BH | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 1012 | PIPA GALVANIS 0 1/2 ' (P=6 M) | BTG | 21,600.00 | 21,600.00 |
| 1013 | PIPA GALVANIS 0 3/4 ' (P=6 M) | BTG | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 1014 | PIPA PVC 0 3/4 ' (P=4 M) | BTG | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1015 | PIPA PVC 0 4 ' (P=4 M) | BTG | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1016 | SEPTICTANK + REMBESAN | BH | 500,000.00 | 500,000.00 |
| LAIN - LAIN | | | | |
| KODE | NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA | SATUAN | HARGA SEBELUM PELIMPAHAN TAHUN 2013 | HARGA TAHUN 2015 |
| 1101 | CAT KAYU | KG | 16,880.00 | 50,300.00 |
| 1102 | CAT TEMBOK | KG | 10,130.00 | 29,500.00 |
| 1103 | PAMUUR | KG | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1104 | MINYAK CAT | LTR | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1105 | AMPLAS | LBR | 300,00 | 4,350.00 |
| 1106 | KUNCI | BH | 30,000.00 | 89,320.00 |
| 1107 | ENGSEL | PSG | 8,100.00 | 15,000.00 |
| 1108 | UPAH PANCANG BETON | M | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 1109 | DIREKSIKEET | M2-L | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1110 | LEM AICA AIBON | KG | 7,000.00 | 42,950.00 |
| 1111 | SALURAN AIR KOTOR | M-LS | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1112 | PIPA AIR BERSIH | M | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1113 | KRAN AIR | BH | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1114 | TITIK LAMPU | BH | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 1115 | STOP KONTAK | BH | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1116 | SEKRING / PANEL | BH | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 1117 | PEMBERSIHAN | M2-L | 1,000.00 | 1,000.00 |

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA



Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 450

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALI KOTA CIMAHU
 NOMOR : 62 Tahun 2018
 TANGGAL : 31 Desember 2018
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN
 WALI KOTA

HARGA DASAR FAKTOR KAWASAN PAJAK REKLAME

a) Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)

| NO | JENIS REKLAME | HARGA DASAR UKURAN | | Harga Dasar Lainnya (Rp.) | SATUAN | Harga Dasar Ketinggian Reklame (Rp/M) | Batas Minimal Masa Pajak / Tahun Pajak |
|----|---|--------------------|--------------|---------------------------|--------|---------------------------------------|--|
| | | < 7 M | 7 s.d < 41 M | | | | |
| 1 | BILLBOARD / BANDO | 250,000 | 375,000 | 500,000 | M2 | 50,000 | 1 Tahun |
| 2 | PAPAN MERK (PMT) / MELEKAT / DINDING DAN BANGUNAN | 100,000 | 150,000 | 200,000 | M2 | 50,000 | 1 Tahun |
| 3 | NEON SIGN / NEON BOX | 100,000 | 150,000 | 200,000 | M2 | 50,000 | 1 Tahun |
| 4 | BALIHO | 50,000 | 75,000 | 75,000 | M2 | | 1 Bulan |
| 5 | MEGATRON / VIDIA TRON | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | M2 | 100,000 | 1 Tahun |
| 6 | KAIN - SPANDUK | 20,000 | 30,000 | 30,000 | M2 | | 7 Hari |
| 7 | POSTER | 10,000 | 12,500 | 15,000 | M2 | | 1 Bulan |

NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR)

| NO | JENIS REKLAME | HARGA DASAR UKURAN | | | Harga Dasar Lainnya (Rp.) | SATUAN | Harga Dasar Ketinggian Reklame (Rp/M) | Batas Minimal Masa Pajak / Tahun Pajak |
|----|-------------------------|--------------------|--------------|--------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| | | < 7 M | 7 s.d < 41 M | ≥ 41 M | | | | |
| 8 | BERJALAN PADA KENDARAAN | 7,500 | 8,000 | 8,500 | | M2 | | 1 Tahun |
| 9 | UDARA / BALON | | | | 500,000 | Buah | | 1 Bulan |
| 10 | FILM / SLIDE | | | | 75,000 | Roll | | 1 Hari |
| 11 | PERAGAAN | | | | 30,000 | Penyelenggaraan | | 1 Hari |

b) Klasifikasi Jalan

| NO | KLASIFIKASI JALAN | HARGA DASAR M2 (Rp.) Billboard, Papan, Megatron, Videotron dan Sejenisnya | | | Harga Dasar / Buah (Rp) Kain Spanduk, Umbul - umbul, Banner & Sejenisnya |
|----|-------------------|---|--------------|---------|--|
| | | < 7 M | 7 s.d < 41 M | ≥ 41 M | |
| 1 | Jl. Nasional | 250,000 | 375,000 | 500,000 | 35,000 |
| 2 | Jl. Provinsi | 200,000 | 300,000 | 375,000 | 30,000 |
| 3 | Jl. Tol | 200,000 | 300,000 | 375,000 | 30,000 |
| 4 | Jl. Kota | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 20,000 |

c) Klasifikasi Kawasan

| NO | LOKASI/KAWASAN | HARGA DASAR M2 (Rp.) Billboard, Ppan, Megatron, Videotron dan Sejenisnya | | | Harga Dasar / Buah (Rp) Kain Spanduk, Umbul - umbul, Banner & Sejenisnya |
|----|---------------------------------------|--|--------------|-----------|--|
| | | < 7 M | 7 s.d < 41 M | ≥ 41 M | |
| 1 | Kawasan Khusus | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 100,000 |
| 2 | Kawasan Selektif / RTH | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 80,000 |
| 3 | Kawasan Perdagangan Modern | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 70,000 |
| 4 | Kawasan Perdagangan Tradisional | 375,000 | 500,000 | 625,000 | 60,000 |
| 5 | Kawasan Jembatan Penyebrangan / Bando | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 50,000 |
| 6 | Kawasan Perumahan | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 40,000 |
| 7 | Kawasan Terbuka | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 30,000 |
| 8 | Kawasan Industri | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 25,000 |
| 9 | Kawasan Perkantoran | 75,000 | 100,000 | 125,000 | 15,000 |
| 10 | Kawasan Pendidikan Militer | 75,000 | 100,000 | 125,000 | 15,000 |

d) Klasifikasi Sudut Pandang

| NO | SUDUT PANDANG | HARGA DASAR M2 (Rp.) Billboard, Papan, Megatron, Videotron dan Sejenisnya | | | Harga Dasar / Buah (Rp) Kain Spanduk, Umbul - umbul, Banner & Sejenisnya |
|----|---------------|---|--------------|---------|---|
| | | < 7 M | 7 s.d < 41 M | ≥ 41 M | |
| 1 | Satu Arah | 100,000 | 150,000 | 300,000 | 15,000 |
| 2 | Dua Arah | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 25,000 |
| 3 | Tiga Arah | 300,000 | 450,000 | 600,000 | 35,000 |
| 4 | Empat Arah | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 50,000 |

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Pin. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 450

LAMPIRAN V : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
 NOMOR : 62 Tahun 2018
 TANGGAL : 31 Desember 2018
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 WALI KOTA CIMAHI NOMOR 5
 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG
 DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN
 WALI KOTA

KOMPONEN PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

1. Nilai Komponen SDA

a. Zona

| Aman | Kritis | Rawan | PDAM |
|------|--------|-------|------|
| 0,30 | 2,60 | 1,10 | 1,00 |

b. Kualitas Air

| A | B | C | PDAM |
|-----|-----|------|------|
| 1,9 | 0,9 | 0,20 | 1,0 |

c. Jenis Sumber Air

| AT Dalam | AT Dangkal | PDAM |
|----------|------------|------|
| 0,80 | 0,20 | 1,00 |

d. Lokasi Sumber Air

| Air Permukaan | Tidak ada sumber air alternatif |
|---------------|---------------------------------|
| 0,60 | 0,10 |

2. Nilai Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan

Jenis Peruntukan/kelompok subjek Air Tanah

| Bahan Penunjang Produksi | Perdagangan dan Jasa | PDAM |
|--------------------------|----------------------|------|
| 3,00 | 2,00 | 1,00 |

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA




PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
 SEKRETARIAT DAERAH

MARIA FITRIANA

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
 NOMOR : 62 Tahun 2018
 TANGGAL : 31 Desember 2018
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 WALI KOTA CIMAHI NOMOR 5
 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG
 DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN
 WALI KOTA

1. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

| | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|--|
|  | PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Kota Cimahi Gd. C. Lantai 2 Telp. (022)-6652559 Fax (022) 6632308 | | SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Terbit 2018 | Nomor R15.04.0290 |
| | NAMA : ALAMAT : NPWPD : MASA PAJAK : JATUH TEMPO : | | | |
| No | Rekening | Uraian Rincian Objek | Jumlah | |
| | | | | |
| | | Jumlah Ketetapan Pokok | | |
| | | Sanksi : a. Denda/Bunga | | |
| | | b. Kenaikan | | |
| | | Jumlah Ketetapan | | |
| Terbilang : | | | | |
| PERHATIAN : 1. Penyetoran dapat dilakukan melalui Bendahara Penerima Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi atau transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Cimahi an. Rekening Pendapatan Pajak nomor rekening 0023260208360 2. Pembayaran secara tunai paling lambat dilakukan tanggal 28 bulan berjalan 3. Pembayaran secara non-tunai paling lambat dilakukan tanggal 25 bulan berjalan 4. Apabila pembayaran melewati Masa Terbit (hari kerja) maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa denda 2% per bulan | | | | |
| TANDA TERIMA SKPD NAMA NPWPD SKPD ALAMAT | | | Cimahi,..... Kepala Bappenda Kota Cimahi NIP. | |

PERHATIAN


1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah:
 - a. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung.
 - b. Struk ATM/bukti pembayaran dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran Pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar; dan
 - b. Ditagih dengan STPD PBB, dan dalam hal STPD PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak:
 - a. diterimanya SPPT ini;
 - b. terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan ketentuan Perda Kota Cimahi No.9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diubah melalui Perda No. 6 Tahun 2014.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal:
 - a. 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 November s/d tanggal 30 November; bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
 - b. 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 November; bulan II adalah tanggal 11 November s/d 10 Desember, dst.

MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
DARI ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

Catatan :

1. Pengaturan warna cetak SPPT PBB dapat disesuaikan dengan kebutuhan
2. Dapat menambahkan ikon Kota Cimahi sesuai dengan kebutuhan
3. Penambahan materi/pencantuman Peraturan Daerah disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

3. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------------------------|-----|--|---|---|-------|--|---|--|-------|--|---|--------------|--|----|---|-----------------------------|--|-----|---|------------------------|--|----|----|---|--|--------------|
|  | <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH JL. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Kota Cimahi Gd. C. Lantai 2 Telp. (022)-6652559 Fax (022) 6632308 Website : cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor : 973 / / / 20..... Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>I. Berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak yang dituangkan dalam Berita Acara dengan nomor : tanggal terhadap :</p> <p>Nama Wajib Pajak : NOP : Alamat Wajib Pajak : Blok/Kav/Nomor : - RT/RW : Desa / Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten / Kota : Kode Pos :</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, jumlah yang masih harus dikembalikan adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 65%;">Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)</td> <td style="width: 15%;">Rp.</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)</td> <td>Rp. -</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)</td> <td>Rp. -</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>PBB Terutang</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>PBB yang seharusnya dibayar</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>PBB yang telah dibayar</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">*7</td> <td>PBB yang lebih bayar/tidak seharusnya terutang (6-5)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">NIHIL</td> </tr> </table> <p>Dengan huruf :</p> <p>*) Catatan :</p> | | 1 | Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) | Rp. | | 2 | Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) | Rp. - | | 3 | Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP) | Rp. - | | 4 | PBB Terutang | | Rp | 5 | PBB yang seharusnya dibayar | | Rp. | 6 | PBB yang telah dibayar | | Rp | *7 | PBB yang lebih bayar/tidak seharusnya terutang (6-5) | | NIHIL |
| 1 | Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) | Rp. - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP) | Rp. - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PBB Terutang | | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PBB yang seharusnya dibayar | | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | PBB yang telah dibayar | | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *7 | PBB yang lebih bayar/tidak seharusnya terutang (6-5) | | NIHIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cimahi, KEPALA BAPPENDA NIP. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. SURAT PERINGATAN



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

JL. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Kota Cimahi Gd. C. Lantai 2
Telp. (022)-6652559 Fax (022) 6632308
Website : cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

Kepada Yth,

.....

.....

Di

BANDUNG

SURAT PERINGATAN

Nomor :

Berdasarkan pembukuan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, ternyata utang Pajak Saudara sampai saat ini belum disetor.

Sebelum berakhirnya batas waktu penyetoran pajak sebagaimana dinyatakan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah, Saudara diminta segera menyetorkan Pajak Reklame ke Kas Daerah.

Jumlah utang Jenis Pajak Saudara, berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima dengan Nomor.....adalah sebesar Rp (.....)

Masa Pajak

Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut maka Saudara bisa mendatangi Bappenda pada jam kerja.

Demikian Surat Peringatan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Cimahi,

KEPALA BAPPENDA

Petugas,

.....

Penerima,

.....

.....
NIP.

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
 NOMOR : 62 Tahun 2018
 TANGGAL : 31 Desember 2018
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN WALI KOTA

TATA CARA PERHITUNGAN PENGURANGAN PBB UNTUK WAJIB PAJAK YANG MENGALAMI KENAIKAN HARGA NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN

Batas Kenaikan Maksimal 30% = (Ketetapan Tahun Sebelumnya X 30%) + Ketetapan Tahun Sebelumnya

Persentase Pengurangan = $\frac{(\text{Ketetapan Tahun Berjalan} - \text{Batas Kenaikan Maksimal})}{\text{Ketetapan Tahun Berjalan}}$

Perhitungan Pengurangan = (Ketetapan Tahun Berjalan) - (Persentase Pengurangan X Ketetapan Tahun berjalan)

Contoh Perhitungan:

Wajib pajak A mengalami kenaikan harga NJOP Bangunan, dimana NJOP Bangunan Tahun 2014 sebesar Rp. 823.000,- dengan ketetapan Rp.1.089.156,- dan NJOP Bangunan Tahun 2015 sebesar Rp 1.516.000,- dengan ketetapan sebesar Rp. 2.101.620,-. Perhitungan pengurangan pajaknya sebagai berikut:

Batas Kenaikan Maksimal 30% = (Ketetapan Tahun Sebelumnya X 30%) + Ketetapan Tahun Sebelumnya
 = (1.089.156,- x 30%) + Rp. 1.089.156,-
 = (Rp. 326.746,- + Rp. 1.089.156,-)
 = Rp. 1.415.903,-

Persentase Pengurangan = $\frac{(\text{Ketetapan Tahun Berjalan} - \text{Batas Kenaikan Maksimal})}{\text{Ketetapan Tahun Berjalan}}$

= $\frac{\text{Rp. 2.101.620} - \text{Rp. 1.415.903}}{\text{Rp. 2.101.620}}$

= $\frac{\text{Rp. 685.717}}{\text{Rp. 2.101.620}} = 0,33$ atau 33 %

Wajib pajak A mendapatkan pengurangan sebesar maksimal 33 % dari ketetapan tahun 2015

Perhitungan Pengurangan = Rp. 2.101.620 - (33% X Rp. 2.101.620)
 = Rp. 2.101.620 - Rp. 693.534
 = Rp. 1.408.085,-

Jadi PBB Terhutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sebesar Rp. 1.408.085,-

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 490

4. SURAT PAKSA



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

JL. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Kota Cimahi Gd. C. Lantai 2
 Telp. (022) 6652559 Fax (022) 6632308
 Website : cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

SURAT - PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Wajib Pajak / Penanggung Pajak :
 NPWPD :
 Alamat :

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

| Jenis Pajak | Tahun Pajak | Nomor dan Tanggal SKPD, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding *) | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan Rp |
|-------------|-------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | |
| Jumlah | | | | |

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Cimahi,
 KEPALA BAPPENDA

 NIP.

Catatan

- Jumlah Tunggakan tersebut belum termasuk denda

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

MARIA FITRIANA

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
 NOMOR : 62 Tahun 2018
 TANGGAL : 31 Desember 2018
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN WALI KOTA

1. SKPDLB PBB

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|--|--|---|---|--|--|---|--|--|--|---|--------------|--|--|---|-----------------------------|--|--|---|------------------------|--|--|----|--|--|--|
|  | <p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH JL. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Kota Cimahi Gd. C. Lantai 2 Telp. (022)-6652559 Fax (022) 6632308 Website : cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor : / /SKPDLB.PBB/ PNM / 20..... Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>I. Berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dituangkan dalam Berita Acara dengan Nomor : Tanggal.....terhadap :</p> <p>Nama Wajib Pajak : NOP : Alamat Wajib Pajak : Blok/Kav/Nomor : RT/RW : Desa / Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten / Kota : Kode Pos :</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, jumlah yang masih harus dikembalikan adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 75%;">Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PBB Terutang</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PBB yang seharusnya dibayar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PBB yang telah dibayar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>*7</td> <td>PBB yang lebih bayar/tidak seharusnya terutang (6-5)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Dengan huruf :</p> | | 1 | Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) | | | 2 | Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) | | | 3 | Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP) | | | 4 | PBB Terutang | | | 5 | PBB yang seharusnya dibayar | | | 6 | PBB yang telah dibayar | | | *7 | PBB yang lebih bayar/tidak seharusnya terutang (6-5) | | |
| 1 | Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PBB Terutang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PBB yang seharusnya dibayar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | PBB yang telah dibayar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *7 | PBB yang lebih bayar/tidak seharusnya terutang (6-5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>*) Catatan : -Dobel pembayaran PBB tahun 20..... sebesar Rp. tgl..... dan sebesar tanggal</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>III. Pengembalian tersebut direstitusi untuk : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 32.80.720.005.022.0036.0 Nama WP : Untuk masa pajak</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Cimahi, KEPALA BAPPENDA NIP.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LAMPIRAN X : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
 NOMOR : 62 Tahun 2018
 TANGGAL : 31 Desember 2018
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 WALI KOTA CIMAHI NOMOR 5
 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG
 DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN
 WALI KOTA

TATA CARA PENGHITUNGAN PERSENTASE PENGURANGAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENSUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ATAU PEGAWAI SWASTA, TERMASUK PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA/DAERAH

Persentase pengurangan pajak bagi wajib pajak orang pribadi pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Pegawai Swasta, termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah didasarkan pada rumus sebagai berikut :

persentase maksimum (25%) X jumlah bobot variabel

Pembobotan variabel yang dimaksud terdiri atas 5 (lima) komponen sebagai berikut :

1. jenis pensiunan
2. jumlah tanggungan
3. jumlah penghasilan
4. masa kerja
5. daya listrik

Nilai pembobotan untuk komponen-komponen di atas tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Jenis Pensiunan

| NO | Jenis | Bobot |
|----|------------------------------------|-------|
| 1 | Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 0.4 |
| 2 | Janda/Duda Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 0.3 |
| 3 | Pensiunan BUMN/D | 0.2 |
| 4 | Pegawai Swasta | 0.1 |

Tabel 2 Jumlah Tanggungan

| No | Jumlah Tanggungan | Bobot |
|----|--------------------------|-------|
| 1 | Lebih dari 2 tanggungan | 0.2 |
| 2 | 2 Tanggungan | 0.15 |
| 3 | Kurang dari 2 Tanggungan | 0.1 |

Tabel 3 Jumlah Penghasilan

| No | Jumlah Penghasilan | Bobot |
|----|----------------------|-------|
| 1 | Lebih dari UMR Kota | 0.1 |
| 2 | UMR Kota | 0.15 |
| 3 | Kurang dari UMR Kota | 0.2 |

Tabel 4 Masa Kerja

| No | Jumlah Masa Kerja | Bobot |
|----|----------------------|-------|
| 1 | Lebih dari 20 Tahun | 0.1 |
| 2 | 20 Tahun | 0.075 |
| 3 | Kurang dari 20 Tahun | 0.05 |

Tabel 5 Daya Listrik

| No | Daya | Bobot |
|----|-----------------------|-------|
| 1 | Lebih dari 1300 Watt | 0.05 |
| 2 | 1300 watt | 0.075 |
| 3 | Kurang dari 1300 watt | 0.1 |

Hasil perhitungan pembobotan dilakukan pembulatan keatas.

Contoh :

A adalah pensiunan PNS dengan masa kerja 21 tahun dan memiliki 3 tanggungan. Jumlah manfaat pensiun yang diterima tiap bulan di atas nilai UMR Kota Cimahi. Rumah A memiliki daya listrik lebih dari 1300 watt, dengan PBB terutang sebesar Rp. 301.197.

Bobot Variabel A sebagai berikut :

1. jenis pensiunan : 0,4
2. jumlah tanggungan : 0,2
3. jumlah penghasilan : 0,1
4. masa kerja : 0,1
5. daya listrik : 0,05

Jumlah Bobot Variabel: 0,85

Persentase Pengurangan Pajak : 25% X 0,85 = 21,25%

dibulatkan menjadi 22 %

- | | | |
|---------------------------------------|-------|------------|
| a. PBB Terutang | : Rp. | 301.197,00 |
| b. Besarnya Pengurangan (22%) | : Rp. | 66.263,34 |
| Pembulatan | Rp. | 66.263,00 |
| c. Jumlah PBB yang seharusnya dibayar | : Rp. | 234.934,00 |

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA



LAMPIRAN XI : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 62 Tahun 2018
TANGGAL : 31 Desember 2018
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA CIMAHI NOMOR 5
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG
DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN
WALI KOTA

MEDIA PERINGATAN UNTUK DITEMPEL

Bentuk Media Peringatan adalah sebagai berikut :

1. Latar Belakang Kuning
2. Pada Bagian Atas dan Bawah terdapat garis miring warna merah dan kuning bergantian.
3. Logo Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada sebelah kiri dilanjutkan tulisan BAPPENDA KOTA CIMAHI dan logo Chima pada sebelah kanan
4. Tulisan OBJEK PAJAK INI BELUM MEMBAYAR dibagian bawahnya terdapat tulisan Jenis Pajak Daerah menggunakan tanda seru.
5. Ukuran Media Peringatan adalah sekurang-kurangnya ukuran Kertas A3.

CONTOH



WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI
SEKRETARIAT DAERAH
CIMAHI
MARIA FITRIANA


57

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 5
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG
DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN WALI KOTA

DRAFT PERWAL INI SUDAH DIPERIKSA OLEH :

| NO | NAMA | JABATAN | PARAF |
|----|------------------------------|---|---|
| 1 | LIA YULIATI A, SE | KABID PENERIMAAN DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN |  |
| 2 | IYUN SAPTA MULYANA, SE., ME | KABID IDENTIFIKASI PENDAPATAN |  |
| 3 | BAYU AGUNG AVIANTO, SH.,M.Si | KASUBBID PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENYULUHAN PAJAK DAERAH |  |

CIMAHI, 31 DESEMBER 2018